

PERAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-PELAPORAN) DALAM PELAPORAN KINERJA ORGANISASI DI LIPI TAHUN 2018-2020

THE ROLE OF ELECTRONIC-BASED MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS (E-PELAPORAN) IN ORGANIZATIONAL PERFORMANCE REPORTING AT LIPI IN 2018-2020

Mai Damai Ria^{1*}, Farham Harvianto²

¹Biro Perencanaan dan Keuangan, ²Pusat Data dan Informasi, ^{1,2}Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Jl. M.H.Thamrin No.8 Jakarta Pusat, 10340

*mai.damai.ria@brin.go.id

ABSTRAK

Monitoring dan evaluasi merupakan sarana untuk memantau kinerja lembaga dan sekaligus memantau penggunaan dana publik. Sebelum tahun 2017, monitoring dan evaluasi di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dilakukan secara manual melalui pertukaran dokumen. Namun, seringkali terjadi kendala teknis karena LIPI memiliki cakupan kegiatan yang beragam dan lokasi unit kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan kerja bersama dengan batas waktu tertentu yang membutuhkan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak, terutama pelaksana kegiatan. Sebelumnya LIPI telah membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik, E-pelaporan sejak tahun 2017 dengan memperbaiki sistem yang telah dibangun sebelumnya. Sistem tersebut dibuat untuk mengurangi kendala sistem manual dan untuk menjawab tuntutan modernisasi sistem administrasi dalam rangka mewujudkan good governance. Karya tulis ini mengkaji penggunaan sistem elektronik tersebut untuk mendukung pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi di LIPI. Sistem pemantauan dan pelaporan kinerja yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja LIPI. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pendukung. Sumber data adalah data primer dari pelaksana sistem dan data sekunder dari dokumen yang relevan. Berdasarkan penelitian terhadap alur kerja pada sistem dan wawancara dengan para pelaksana sistem, dapat disimpulkan bahwa E-pelaporan mempermudah pengumpulan, verifikasi, dan validasi data capaian kinerja sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. E-pelaporan juga dapat menjembatani pemantauan kinerja secara makro di tingkat lembaga dengan pemantauan kinerja secara lebih mikro di level unit kerja dan individu. Akuntabilitas kelembagaan juga meningkat dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yang menampilkan informasi kinerja organisasi secara ringkas dan mudah dibaca. E-pelaporan membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari unit kerja yang berbeda, yaitu Civitas sebagai individu, Satker sebagai institusi, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Kata kunci: pemantauan dan evaluasi, kinerja, e-government

ABSTRACT

Monitoring and evaluation is a means to monitor the use of public funds and at the same time monitor the performance of institutions to create a transparent and accountable bureaucracy (good governance). Before 2017, monitoring and evaluation in LIPI has been carried out using a manual system through the exchange of documents. However, there are often difficulties in technical implementation due to the many and varied numbers of activities that must be monitored. In addition, LIPI has a broad scope of activities and work unit locations spread across various regions in Indonesia. Meanwhile, monitoring and evaluation is a joint work with a certain time limit, which requires the cooperation and involvement of various parties, especially the implementers of the activities. LIPI has built an electronic-based monitoring and evaluation system, E-pelaporan, since 2017 by updating the system that was built before. The system was created to reduce obstacles to the manual system and to respond to the demands of modernizing the administrative system in order to create good governance. This paper examines the use of these electronic systems to support performance

organizational monitoring and reporting at LIPI. A good performance monitoring and reporting system can increase the transparency and accountability of LIPI's performance so as to support the achievement of good governance. The method of analysis uses descriptive analysis with a qualitative approach based on the results of interviews and supporting documents. Data sources are primary data from system implementers and secondary data from relevant documents. Based on research on workflow on the system and interviews with system implementers, it can be concluded that E-pelaporan makes it easier to collect, verify, and validate performance achievement data so that the time required is shorter. E-pelaporan can also bridge macro level of performance monitoring in institutions with performance monitoring at a more micro level in work units and individuals. Institutional accountability has also increased with the availability of an electronic-based monitoring and evaluation system that displays organizational performance information in a concise and easy-to-read manner. E-pelaporan requires the collaboration of various parties from different work units, namely the Civitas as an individual, the Work Unit as an institution, and the Planning and Finance Bureau.

Keywords: *monitoring and evaluation, performance, e-government*

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat kewajiban setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerjanya berdasarkan perjanjian kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Akuntabilitas ini merupakan wujud tata kelola yang baik (*good governance*) yang menjadi ciri birokrasi di negara maju. Akuntabilitas menunjukkan kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan nilai/norma eksternal dimata pemangku kepentingan. Bank Dunia menyatakan bahwa tata kelola yang baik meliputi tata kelola berdasarkan undang-undang (aturan), transparansi, akuntabilitas, keandalan informasi, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan (Prasojo & Kurniawan, 2008). Di Indonesia, tuntutan *good governance* mengemuka ketika terjadi perubahan sistem birokrasi yang ditandai dengan penancangan program reformasi birokrasi. Menurut Utomo (Utomo, 2011), langkah awal reformasi birokrasi adalah perbaikan kelembagaan seperti efisiensi dan penyederhanaan prosedur kerja, peningkatan sumber daya manusia, penanganan peraturan yang tumpang tindih, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sehingga

laporan kinerja menjadi ukuran akuntabilitas suatu instansi pemerintah dan menjadi salah satu instrumen penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu aspek penting dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Menurut PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan) dan tahunan. Untuk mewujudkan pengukuran kinerja secara berkala tersebut, diperlukan pengawasan terhadap setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen (Mukaromah, 2011) yang melakukan kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi (Glendoh, 2000). Pengawasan mengandung aspek monitoring dan evaluasi yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan suatu program dan kegiatan telah dilaksanakan dan sejauh mana output program dan kegiatan telah tercapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi selama kegiatan tersebut sangat penting sebagai data dan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, instansi pemerintah sebagai bagian dari birokrasi dituntut untuk dapat menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik. Diera teknologi informasi yang berkembang pesat ini, tata kelola yang baik

tidak hanya menuntut kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan harapan masyarakat, tetapi juga kecepatan dan kemudahan. Menurut Sartomo (Sartomo, 2012), prinsip dalam mewujudkan *good governance* adalah penyederhanaan proses kerja yang kompleks (*simplification*), meniadakan proses kerja yang tidak perlu (*elimination*), menciptakan proses kerja yang belum ada (*reengineering*), dan mengintegrasikan proses kerja yang sudah ada dengan teknologi (otomatisasi). Salah satu faktor penting dalam mewujudkan *good governance* adalah modernisasi sistem administrasi dengan menggunakan sistem elektronik (*e-government*). Sistem elektronik menjanjikan proses yang lebih akuntabel, transparan, dan dengan biaya lebih rendah. Sistem elektronik memiliki peran yang signifikan dalam mengendalikan korupsi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi waktu dan biaya pelayanan (Bhuiyan, 2011). Dapat dikatakan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mendorong terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan kinerja di instansi pemerintah.

Melihat pentingnya pelaporan kinerja, wajar jika setiap instansi pemerintah berusaha memperkuat aspek monitoring dan evaluasi serta membangun sistem yang dapat memberikan informasi terkait kinerja instansi tersebut. Kebutuhan untuk menyediakan informasi kinerja secara cepat dan akurat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah di era teknologi informasi ini.

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) memiliki 53 unit kerja yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Selain lokasinya yang terpencar, bidang keilmuan yang diemban juga sangat bervariasi. Untuk membuat laporan kinerja membutuhkan waktu dan proses yang lama. Mulai dari pengumpulan laporan dari tingkat akar rumput, verifikasi dan validasi laporan yang masuk, hingga laporan di tingkat lembaga yang tentunya harus sesuai dengan indikator output utama di tingkat lembaga. Laporan pada tingkat lembaga harus merangkum seluruh laporan rinci dari setiap kegiatan penelitian dan memastikan kesesuaian antara indikator utama dengan rincian kegiatan yang dilakukan di lapangan. Lokasi yang jauh membuat proses verifikasi dan validasi tidak dapat dilakukan dengan

cepat dan seringkali membutuhkan biaya yang tinggi saat melakukan kunjungan lapangan. Apalagi ketika sistem yang digunakan masih mengandalkan pendataan manual melalui pertukaran dokumen (*file*) elektronik. Lalu lintas data yang besar dan bervariasi antar bagian juga menambah kompleksitas proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data. Rumitnya proses manual seringkali juga membuat proses pelaporan tidak tuntas secara kualitas sehingga data yang dihasilkan menjadi kurang valid. Hal ini membuat pemantauan progres pencapaian tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal.

Untuk memenuhi tuntutan tata kelola yang baik, LIPI berusaha memodernisasi sistem administrasi, khususnya dalam pelaporan kinerja organisasi, dengan membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik, yaitu E-pelaporan. E-pelaporan merupakan sistem monitoring dan evaluasi LIPI yang menggunakan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai instrumennya. E-pelaporan menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai dasar pemantauan dan pelaporan. Sistem ini sekaligus untuk mengatasi kendala dalam pelaporan kinerja LIPI terkait lokasi yang tersebar dan luasnya bidang ilmu yang menjadi ruang lingkup kerja LIPI.

Kinerja

Menurut Riyadini (Riyadini, 2013) kinerja adalah keluaran produktif dari suatu sistem kebijakan atau program dalam bentuk yang nyata. Kinerja yang dimaksud di sini adalah kinerja organisasi. Kinerja berkaitan erat dengan tujuan kebijakan atau program, yaitu kemampuan untuk mencapai atau pencapaian terhadap tujuan kebijakan/program tersebut. Bagi instansi pemerintah yang dibiayai dari dana publik, kinerja atau pencapaian terhadap tujuan suatu program kerja harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Dari pengukuran kinerja tersebut dapat diketahui seberapa efektif suatu instansi dalam menggunakan dana publik untuk mencapai target dan mewujudkan tujuan pembangunan. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan kelangsungan program. Pengukuran kinerja sangat erat kaitannya dengan proses pengelolaan pencapaian yang dimulai dari perencanaan strategis, penetapan

program sampai pada pemantauan dan evaluasi, dan analisis pencapaian serta mendapatkan umpan balik dari pencapaian tersebut (Sadjiarto, 2000).

Menurut (Forbes et al., 2005), kinerja pemerintah merupakan karakteristik dan konsekuensi dari penyediaan layanan yang harus disediakan oleh lembaga publik pemerintah. Kinerja bukan hanya tentang apa yang telah dicapai, tetapi juga bagaimana cara mencapainya. Hubungan antara dampak dan proses kebijakan perlu dilihat untuk memahami apakah kinerja yang ditampilkan merupakan hasil dari kebijakan yang diterapkan atau ada alasan lain. Pengukuran kinerja sangat erat kaitannya dengan proses pengelolaan kinerja. Dalam lingkup yang lebih kecil yaitu level instansi, pengelolaan capaian harus dilakukan dengan baik agar dampak dari kegiatan yang dilakukan dapat terukur.

Menurut (Sadjiarto, 2000), pengukuran kinerja dibagi menjadi tiga indikator, (1) indikator pengukuran *service effort*, yaitu bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya meliputi keuangan dan non-keuangan; (2) indikator pengukuran *service accomplishment* yaitu bagaimana prestasi dari suatu program dan kegiatan diukur. Ukuran prestasi dalam jangka pendek adalah output, yaitu output yang dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ukuran prestasi dalam jangka panjang adalah outcome yaitu mengukur dampak keluaran yang dihasilkan terhadap masalah yang hendak diatasi; (3) indikator yang menghubungkan *effort* dengan *accomplishment* yaitu mengukur efisiensi.

Penetapan indikator kinerja sangat penting agar hasil pengukuran kinerja mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Rustiadi et al., 2009). Indikator kinerja terdiri dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu kegiatan. Dalam evaluasi kinerja, indikator berfungsi untuk memperjelas apa, berapa banyak, dan kapan kegiatan dilakukan, menciptakan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat untuk menghindari interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerjanya, membangun dasar bagi

pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. kinerja unit kerja.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan.

Ukuran kinerja pada instansi pemerintah berkaitan dengan kemampuan instansi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja ditetapkan mengikuti target dalam rencana kinerja yang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga dan program kerja pemerintah. Komitmen kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara pimpinan instansi dengan pihak yang secara hierarki adalah atasannya. Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014.

Pemantauan dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh instansi untuk memastikan pelaksanaan program *on the track* dan memantau sejauh mana pencapaian kinerjanya. Pemantauan adalah pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran tentang suatu kebijakan hubungannya dengan sasaran dan hasil dalam jangka waktu tertentu (Maric, 2014). Sedangkan evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif terhadap kegiatan/program/kebijakan yang sedang berlangsung atau sudah selesai (Widyawati, 2017). Evaluasi didasarkan pada data yang diperoleh sebelumnya dan biasanya digunakan untuk menganalisis hasil dan dampak implementasi suatu kebijakan atau program tertentu. Namun demikian, evaluasi tidak hanya melihat dampak tetapi dapat dilakukan secara komprehensif mencakup aspek yang lebih luas. Vedung dalam Greene (Greene, 1999) menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian retrospektif yang cermat terhadap jasa/manfaat (*merits*), harga (*worth*), dan nilai administratif, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari kebijakan pemerintah. Sedangkan evaluasi program adalah pengumpulan informasi secara sistematis

tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian program, meningkatkan efektivitasnya dan/atau memberikan dasar untuk keputusan program di masa mendatang (Riyadini, 2013). Pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Pemantauan bertujuan untuk melihat dan atau menilai apakah suatu program atau kegiatan berada pada jalurnya atau tidak, dan untuk mengukur kinerja proses pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Sedangkan tujuan evaluasi menurut Riyadini (Riyadini, 2013) adalah (1) mengambil keputusan dan menentukan pilihan kebijakan/program/kegiatan; (2) mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan jangka pendek untuk melakukan revisi atau penyesuaian terhadap tuntutan baru; (3) mengukur tingkat keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain untuk memantau pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, pemantauan dan evaluasi juga diharapkan membawa dampak lanjutan bagi kualitas administrasi public pemerintah. ReSPA (ReSPA, 2015) menyatakan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang berfungsi dengan baik dapat:

1. Memperkuat efektivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan dalam kebijakan publik. Pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat akan membawa perubahan besar dalam gaya operasional dan budaya kerja dalam pelayanan publik.
2. Membawa dampak lanjutan yaitu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Bahkan monitoring dan evaluasi kebijakan publik adalah syarat perlu untuk menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang cukup dari pemerintah dalam mengalokasikan dan menggunakan dana publik. Sehingga dikatakan bahwa membangun kerangka kerja monitoring dan evaluasi akan memperkuat prinsip tata Kelola yang demokratis, meningkatkan responsivitas kebijakan dan berkontribusi untuk menghasilkan kepercayaan publik.
3. Mempengaruhi tata kelola ekonomi karena sistem monitoring dan evaluasi yang

berfungsi dengan baik secara langsung mempengaruhi fungsi kebijakan publik untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi perlu diketahui indikator kinerja dan target program/kegiatan. Indikator kinerja merupakan ukuran yang memudahkan untuk melakukan penilaian dalam monitoring dan evaluasi. Indikator suatu program/kegiatan pembangunan harus terukur dan dapat dinilai atau konkrit, atau memenuhi kategori *smart: specific, measurable, achievable, relevant, timebound*. Sedangkan target kinerja menjadi acuan untuk menilai kesenjangan antara target dengan realita hasil yang dicapai.

Membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk kebijakan publik merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan dalam modernisasi administrasi publik. Sekaligus dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan kebutuhan/tuntutan publik (ReSPA, 2015). Dapat dikatakan bahwa monitoring dan evaluasi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat kinerja. Yang membedakan adalah kedalaman analisis dan cakupan pandangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi kebutuhan organisasi yang berorientasi pada hasil untuk mengetahui seberapa jauh organisasi dalam mencapai tujuannya atau untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Monitoring dan evaluasi juga merupakan sarana bagi organisasi untuk mendapatkan umpan balik dari proses yang telah berjalan sehingga organisasi dapat melakukan perbaikan secara terus menerus.

Pemantauan dan evaluasi kinerja di instansi pemerintah

Dikutip dari Widyawati (Widyawati, 2017), dari perspektif perencanaan pembangunan ada beberapa macam evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi ex-ante, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih alternatif kebijakan terbaik dari berbagai alternatif dan memastikan bahwa dokumen perencanaan terstruktur, koheren, dan sistematis. Kementerian/lembaga biasanya melakukan evaluasi ini sebelum APBN

- ditetapkan, yakni pada saat penyusunan RKAKL.
2. Evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja aktual atau realisasi (apa yang telah dicapai) dengan target (apa yang harus dicapai). Evaluasi Pengukuran Kinerja dilakukan oleh kementerian/lembaga secara periodik setiap triwulan. Kemudian pada akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan dievaluasi hasilnya dibandingkan dengan kinerja sebelumnya.
 3. Evaluasi proses yaitu evaluasi untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan/program kegiatan.
 4. Evaluasi kebijakan strategis (*grand program*) yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara kegagalan atau keberhasilan rencana dengan mengukur semua aspek: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada saat mengevaluasi renstra dengan melihat keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kementerian/lembaga.

Pemerintah telah memiliki kebijakan yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pembangunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh kementerian/lembaga sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja masing-masing instansi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan adalah aplikasi e-Monev yang dikembangkan oleh Bappenas dan berlaku secara nasional. Aplikasi e-Monev menggunakan Rencana Kerja (Renja) kementerian/lembaga sebagai indikator dalam memantau kinerja kementerian/lembaga. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang dilaporkan dalam aplikasi e-Monev dapat menggambarkan capaian kinerja masing-masing kementerian/lembaga. Namun kinerja lembaga tidak bisa dilihat dari capaian aplikasi e-Monev saja, karena indikator yang digunakan sangat terbatas pada indikator inti atau utama. Hal ini disebabkan oleh luas dan beragamnya pekerjaan, ruang lingkup, dan

proses bisnis dari berbagai kementerian/lembaga.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada tata kelola birokrasi lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan mengendalikan jalannya kegiatan. Pemerintah di seluruh dunia berusaha menciptakan sistem berbasis elektronik untuk mendukung birokrasi (*e-government*). Diakui secara luas bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme yang dapat membantu instansi pemerintah menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberikan pelayanan publik. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi berbasis web lainnya untuk menyediakan akses bagi terciptanya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan bagi semua warga negara (Singh et al., 2020). Penggunaan TIK sangat berguna untuk mengekang korupsi administratif di dalam lembaga pemerintah (Adesuyi & Gberevbie, 2022), terutama membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam banyak proses administrasi seperti pengadaan dan catatan keuangan lainnya. Selain itu juga berfungsi sebagai alat penghematan biaya di banyak bidang, seperti mengumpulkan laporan kemajuan kegiatan dari berbagai bidang dan topik. *E-government* telah berkembang dari awal penggunaannya menjadi aplikasi yang lebih transaksional dan terintegrasi. Bahkan sudah menjadi tren umum, pemerintah pusat berbagai negara telah mulai menambahkan sistem teknologi dan organisasi yang canggih dalam administrasi pemerintahnya, diikuti oleh pemerintah di level bawahnya (Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007). Lebih jauh lagi, situs web pemerintah harus memfasilitasi proses demokrasi yang melibatkan tidak hanya berbagi informasi dan penyampaian layanan publik yang lebih baik, tetapi juga musyawarah dan produksi bersama (Lee-Geiller & Lee, 2019). Meskipun memiliki manfaat yang besar, sistem berbasis elektronik membutuhkan sumber daya yang disiapkan, termasuk infrastruktur teknis berupa jaringan internet dan perangkat keras, biaya yang besar dan sumber daya manusia yang terlatih.

Tabel 1. Sistem Pemantauan dan Evaluasi di Indonesia

No	Dasar hukum	Substansi Laporan	PJ
Monev Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan			
1	PP No. 39/2006	Realisasi penyerapan anggaran Realisasi pencapaian target keluaran (<i>output</i>) Kendala yang dihadapi	Bappenas
Monev Pengadaan Barang/Jasa			
2	Perpres No.54/2010 dan Perubahannya Perpres No. 70/2012	Pagu Pengadaan Rencana Umum Pengadaan dan Realisasi Pengadaan Kinerja Pengadaan	LKPP
Monev Kinerja Penganggaran			
3	PMK No. 249/2011	Rencana dan Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Output	Kemendagri
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)			
4	PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011	Perencanaan hingga Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan hingga Pengelolaan Barang Daerah Pengelolaan Penggajian Pegawai Daerah Pendataan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah	BPKP
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)			
5	UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 56 Tahun 2005, Permenkeu No. 46 tahun 2006	Pagu Anggaran Daerah Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pinjaman Daerah Defisit Anggaran Daerah	Kemendagri
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			
6	PP No. 8/2008	Realisasi penyerapan anggaran Realisasi pencapaian target keluaran (<i>output</i>)	Kemendagri
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat			
7	Permenkeu No. 59/2005	Laporan Realisasi Anggaran Laporan arus kas Neraca Catatan atas Laporan Keuangan	Kemendagri
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)			
8	Perpres No. 29 Tahun 2014	Rencana Strategis Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan evaluasi kinerja	Kemendagri
TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN)			
9	Keppres No. 20 Tahun 2015	Struktur Anggaran Progres Keuangan (Rencana dan Realisasi) Progres Fisik (Rencana dan Realisasi)	KSP

Indonesia sudah memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan pembangunan. Hingga tahun 2017, terdapat 9 peraturan perundang-undangan terkait pemantauan dan evaluasi pembangunan dalam sistem birokrasi Indonesia (Widyawati, 2017), ditunjukkan pada Tabel 1. Kesembilan peraturan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda dan diimplementasikan ke dalam sistem untuk mengawal program pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Sistem pemantauan dikendalikan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang bertanggung jawab, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Staf Presiden Perkantoran (KSP).

Secara garis besar, substansi laporan yang dilihat dalam sistem monitoring dan evaluasi di Indonesia terkait dengan penggunaan anggaran dan pencapaian output. Namun kedua hal tersebut dilihat dari sudut pandang dan penekanan yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga yang membidangi. Akibatnya, sistem yang dibangun berbeda dan tidak terintegrasi. Berbagai sistem ini membuat unit kerja harus membuat berbagai laporan dengan berbagai data yang isinya saling bersinggungan. Dalam beberapa sistem ini secara rutin dilakukan pengecekan dan inspeksi di lapangan. Seperti Kementerian Keuangan melalui mekanisme pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dan BPKP. Kemenpanrb melalui mekanisme penilaian SAKIP. Namun, sebagian besar sistem monitoring dan evaluasi mengandalkan pemantauan dengan mengumpulkan data melalui dokumen baik daring maupun luring.

Secara umum sistem monitoring dan evaluasi yang diuraikan di atas adalah untuk mengukur dan memantau kinerja lembaga secara nasional berdasarkan indikator kinerja tertentu yang menjadi fokus lembaga yang melakukan pemantauan. Selain sistem, masing-masing instansi juga membuat sistem pengawasan internal secara mandiri. Kantor BKN Banjarmasin mengembangkan sistem pemantauan kinerja PNS dengan aplikasi SKP berbasis web (Rahman, 2016). Sistem tersebut digunakan untuk mempercepat proses atasan dalam memantau kegiatan yang dilakukan

oleh pegawai dan untuk memudahkan dalam penyimpanan laporan dan pengawasan pegawai oleh atasan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengimplementasikan aplikasi e-kinerja untuk penilaian kinerja pegawai (Denti et al., 2021). Sistem tersebut dijadikan dasar untuk mengukur pencapaian perilaku kinerja pegawai, kecenderungan memberikan tambahan penghasilan pegawai, mengukur kedisiplinan pegawai dan sebagainya.

Sistem pengawasan berbasis elektronik yang dibuat secara mandiri oleh instansi mayoritas berfokus pada lingkup kinerja SDM atau kinerja personal. Sistem tersebut digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memantau dan menilai kinerja personal. Sedangkan untuk kinerja organisasi belum banyak instansi yang membangun sistem informasi di lingkup internal. E-pelaporan merupakan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi berbasis elektronik. Sistem ini bisa menjadi alternatif untuk melengkapi sistem Lembaga sehingga kinerja personal dan kinerja organisasi dapat dipantau secara lebih mudah dan terpadu.

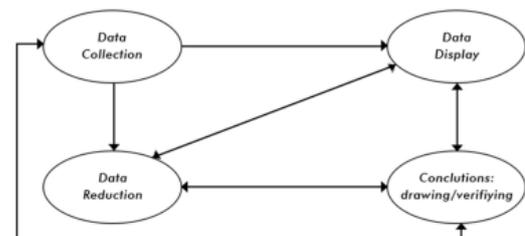
Karya tulis ini memaparkan tentang sistem E-pelaporan yang digunakan untuk mendukung pelaporan kinerja organisasi LIPI. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yang dimiliki LIPI dan perannya dalam mewujudkan birokrasi modern menuju *good governance*. Di akhir diskusi, disampaikan saran-saran perbaikan agar sistem E-pelaporan dapat secara optimal mendukung pelaporan kinerja LIPI yang lebih baik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang terkumpul dalam bentuk wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang dikaji yang terjadi di lapangan (Wiratha, 2006). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari fenomena yang diamati (Moleong, 2007). Analisis deskriptif dengan

pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data yang detail, mendalam, dan aktual. Langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah: 1) pengumpulan data; 2) transkripsi dan dokumentasi data yang relevan; 3) pengembangan tema; 4) analisis tema; 4) interpretasi; 5) pembuatan laporan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles and Huberman (Gambar 1). Pada saat pengumpulan data juga dilakukan reduksi data dengan memilih poin-poin utama dan meringkasnya untuk diproses ke tahap selanjutnya. Setelah mereduksi data, dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian, diagram, tabel dan atau bentuk lain yang sesuai. Setelah itu ditarik kesimpulan sesuai dengan bukti-bukti lapangan. Proses ini dilakukan secara terus menerus dan berulang kali hingga ditemukan kesimpulan yang terpercaya (Sugiyono, 2017).



Gambar 1. Analisis Data Model Miles dan Huberman

Penelitian dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020. Penelitian dilakukan pada penggunaan sistem elektronik, E-pelaporan, aplikasi yang digunakan untuk memantau perkembangan keluaran Perjanjian Kinerja di LIPI. Aplikasi E-pelaporan digunakan oleh seluruh unit kerja di LIPI melalui sistem internet internal yaitu intralipi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan tidak melalui media perantara. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem aplikasi E-pelaporan yang meliputi sistem kerja aplikasi dan sistem kerja pengguna. Data primer diperoleh dari para pelaksana sistem, baik dari sisi pengembang

maupun pengguna aplikasi E-pelaporan. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen terkait E-pelaporan dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber penelitian yaitu pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi serta observasi terhadap sistem. Selain itu, dilakukan pula riset dokumen terhadap dokumen terkait aplikasi E-pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis bagi pemantauan program kerja, LIPI telah membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yaitu E-pelaporan, ditampilkan pada Gambar 2. Sistem E-pelaporan ini dibangun sebagai pendukung dari implementasi peraturan pemerintah tentang kewajiban untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana pembangunan. Cikal bakal sistem E-pelaporan telah dibangun sejak tahun 2014 yaitu dengan nama Kinerja Lembaga dimana pengisian data masih bersifat manual dan belum terintegrasi satu sama lain. Pada sistem ini indikator kinerja dan progress capaiannya diinput secara manual oleh petugas. Indikator kinerja diinput pada awal tahun ke dalam database dan menjadi acuan sepanjang tahun. Progres capaian diinput setiap bulan oleh petugas berdasarkan laporan dari pelaksana kegiatan. Pengumpulan laporan dilakukan secara konvensional melalui pertukaran dokumen antar pihak yang terlibat.

Sistem ini telah diperbarui pada tahun 2017. Perubahan mendasar pada sistem baru ini adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi sehingga setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara langsung dalam sistem sesuai fungsinya. Pada sistem ini, input data capaian dilakukan oleh seluruh civitas, tidak lagi oleh petugas khusus. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi sehingga data yang diinput dapat digunakan untuk beberapa fungsi sesuai dengan keperluannya. Integrasi tersebut mengurangi input data secara berulang karena data yang diinput sekali dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang membutuhkan data yang sama. Integrasi itu juga membuat menyingkat proses

verifikasi dan validasi. Verifikasi sebelumnya dilakukan secara luring melalui dokumen yang dikirimkan. Sedangkan pada sistem ini verifikasi dan validasi dilakukan secara daring pada sistem dan dapat dilakukan setiap saat ketika data sudah diinput.

NAMA SATUAN KERJA	CAPAIAN %			
	I	II	III	IV
KEPALA LEMBAGA (LMU) PENGETAHUAN INDONESIA				
Inspektorat	100,00	90,48	105,41	88,23
Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah	112,37	125,03	155,28	166,94
Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100,00	100,00	100,00	58,89
Pusat Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	130,00	92,00	191,25	94,90
Balai Media dan Reproduksi (LMU Press)	148,03	118,24	121,89	105,12
Balai Informasi Teknologi	195,03	148,41	145,20	190,35
SEKRETARIAT UTAMA				
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	94,14	0,00	0,00	0,00
Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	112,48	180,65	150,35	127,05

Gambar 2. Tampilan E-pelaporan

E-pelaporan merupakan sistem monitoring kinerja lembaga sehingga basis data yang digunakan adalah dokumen PK (Perjanjian Kinerja) yang merupakan instrumen untuk mengukur kinerja lembaga. Target pada PK menjadi indikator yang dipantau pencapaiannya dan dilaporkan setiap tiga bulan (triwulan). Sistem ini mengelompokkan data capaian kinerja ke dalam 2 kelompok besar yaitu kinerja yang berupa publikasi ilmiah dan kinerja yang berupa aktivitas dimana output yang dihasilkan adalah non publikasi. E-pelaporan menghubungkan capaian individu dengan capaian lembaga melalui sistem yang terintegrasi.

Informasi utama yang dimuat dalam E-pelaporan adalah:

1. Sasaran dan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang ditampilkan adalah sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja utama pada level lembaga/eselon I. Selain itu juga ditampilkan indikator kinerja kegiatan dan target tahunan dari setiap satuan kerja di LIPI.
2. Keluaran. Keluaran atau output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. Keluaran yang dimaksud di sini adalah hasil dari kegiatan penelitian dan kegiatan lain yang dilakukan oleh individu di dalam satuan kerja. Hasil kegiatan individu tersebut dapat diklaim menjadi keluaran atau kinerja satuan kerja setelah melalui proses validasi. Keluaran diinput oleh seluruh Civitas LIPI. Keluaran

dikelompokkan ke dalam 2 menu utama yaitu *Publikasiku* dan *Kegiatanku*. *Publikasiku* merupakan menu yang disediakan untuk seluruh Civitas LIPI mencatat hasil kerja atau output berupa publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dapat berupa artikel ilmiah yang terbit pada jurnal/prosiding, *policy brief*, paten dari hasil penelitian, buku, dll. Sedangkan *Kegiatanku* disediakan untuk mencatat seluruh output yang bukan publikasi ilmiah, seperti lisensi, kerjasama, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pameran, dan lain-lain.

3. Capaian Kinerja Organisasi. Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai dari setiap target pada indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja yang ditampilkan adalah capaian kinerja organisasi dari seluruh satuan kerja di LIPI. Hasil capaian ditampilkan dalam persentase dan status warna (*traffic light system*) dimana warna merah untuk capaian 0%, warna kuning bila capaian berada pada rentang 0%-80%, warna biru untuk capaian 81% ke atas.
4. Dokumen kinerja. Dokumen kinerja yang menjadi acuan dan bukti kegiatan dapat dilampirkan *softcopy*-nya dan dapat diunduh secara langsung.

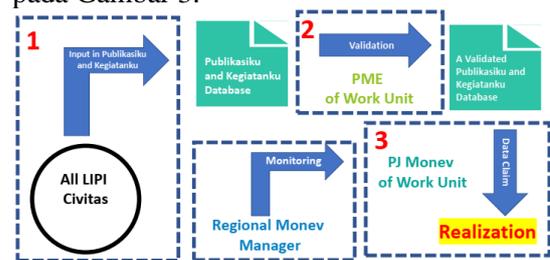
Secara umum ada 3 pihak yang terlibat untuk menjalankan E-pelaporan dimana masing-masing pihak memiliki peran (*role*) yang berbeda. Agar sistem E-pelaporan dapat berjalan baik, perlu kolaborasi ketiga pihak tersebut untuk bekerja sesuai perannya, meskipun mereka berada pada satuan kerja yang berbeda. Tiga pihak tersebut adalah:

1. Seluruh Civitas LIPI. Seluruh Civitas LIPI, baik pada satuan kerja teknis dan non teknis, dapat mengakses E-pelaporan. Peran Civitas adalah melakukan pengisian capaian output kegiatan masing-masing melalui menu *Publikasiku* dan *Kegiatanku*. Hasil pengisian itulah yang akan digunakan sebagai capaian kinerja lembaga. Selain menjadi capaian kinerja lembaga, juga digunakan sebagai capaian individu untuk SKP (sistem Kinerja Individu) dalam sistem e-kinerja.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) sebagai pengelola pusat. Peran BPK di

dalam epelaporan dilakukan melalui 2 pihak yaitu :

- Penanggungjawab Monev Satuan Kerja (Pj Monev). Pj Monev bertugas mengisi target dan melakukan klaim realisasi PK satuan kerja berdasarkan data isian dari Civitas, menyusun laporan kinerja berdasarkan data dari satuan kerja dan mengupload ke dalam sistem.
 - Manajer Monev Kawasan. Manajer Monev bertugas melakukan monitoring capaian kinerja dan laporan kegiatan satuan kerja.
3. Satuan kerja. Satuan kerja bertugas memvalidasi seluruh data *Kegiatanku* dan *Publikasiku* yang diinput oleh setiap Civitas. Validasi dilakukan untuk memilah data keluaran mana saja yang dapat diklaim sebagai capaian kinerja satuan kerja. Selain itu juga untuk memastikan bahwa data keluaran yang diinput oleh Civitas relevan dengan indikator kinerja atau target yang dituju karena data keluaran juga akan digunakan sebagai bukti pencapaian SKP individu. Peran ini dijalankan oleh personil yang ditunjuk oleh satuan kerja untuk menjalankan fungsi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (PME) di satuan kerja.

Alur kerja ketiga pihak di atas digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Kerja E-pelaporan

Proses dimulai dari seluruh Civitas melakukan input data capaian ketika kegiatan yang mereka lakukan telah menghasilkan output. Input tersebut menghasilkan serangkaian data capaian yang masuk ke dalam database publikasiku dan kegiatanku. Pada sistem sebelumnya data capaian ini dilaporkan secara manual melalui dokumen sebagai laporan kegiatan. Data capaian tersebut diverifikasi dan validasi oleh PME

satuan kerja tempat Civitas beraktivitas. Validasi tersebut untuk menjamin akurasi dari klaim output yang dicapai. Pada sistem sebelumnya Langkah ini dilakukan secara luring pada laporan kegiatan dari Civitas. Setelah diperoleh data output yang sudah valid, petugas dari BPK melakukan klaim pada data output sesuai dengan indikator yang ada pada PK. Pada saat klaim ini juga dilakukan validasi ulang untuk memastikan bahwa verifikasi dari satuan kerja sudah tepat. Setelah klaim dilakukan maka sistem akan menghitung secara otomatis persentase capaian kinerja yang diperoleh satuan kerja. Pada *dashboard* sistem juga akan bisa dilihat status nilai kinerja dari satuan kerja yang bersangkutan. Status nilai kinerja ini dapat dilihat secara terbuka oleh pimpinan maupun seluruh Civitas. Setelah diketahui realisasi kinerja maka dapat dilakukan penyusunan laporan kinerja secara lengkap. Pada sistem sebelumnya tidak ada penghitungan kinerja secara otomatis. Capaian kinerja diinput secara manual tiap bulan oleh petugas yang ditunjuk dari satuan kerja. Bila ingin mengetahui persentase kinerja juga harus dihitung secara manual.

Dari alur kerja pada Gambar 3, terlihat bahwa E-pelaporan memerlukan peran aktif dari seluruh Civitas untuk menginput data capaiannya supaya dapat menyajikan informasi kinerja yang lengkap. Selain lengkap, informasi tersebut juga harus andal sehingga perlu dilakukan validasi dari pihak satuan kerja dimana Civitas tersebut berkegiatan. Berdasarkan data yang lengkap dan andal tersebut dapat disusun laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan secara manual berdasarkan data capaian yang sudah divalidasi satuan kerja. Sistem E-pelaporan hanya menyajikan informasi capaian kinerja secara ringkas berupa tabel. Lihat Gambar 4.

NO	IKK SATKER	Target Tahunan	CAPAIAN %				
			I	II	III	IV	
1	Tersusunnya Rancangan SKBN	5 Naskah	0	0	0	0	0
2	Terlaksananya Penilaian Kinerja dan Evaluasi Jabatan Fungsional Peneliti	1 Laporan	0	0	0	0	0
3	Tersusunnya Rancangan Peraturan Jabatan Fungsional Baru	5 Naskah	0	0	0	0	0
4	Terlaksananya Program, Kerjasama, dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM	1 Laporan	0	0	0	0	0
5	Terlaksananya peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM IPTEK melalui S3 By Research	100 Orang	30	130	50	80	78
6	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas di Pusbindikt LIPI	78 Nilai	0	0	0	0	0

Gambar 4. Tampilan Capaian Kinerja

Sedangkan analisis setiap indikator disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan hasilnya diupload ke dalam sistem E-pelaporan. Dengan menekan tombol biru yang didalamnya terdapat angka, dapat terlihat detail dari Capaian pada Triwulan tersebut, Lihat gambar 5.

Tgl Input	Judul	Jumlah
2019-07-09 08:29:11	S.b. Peserta Program Belajar by Research Batch II	7
2019-05-20 07:40:41	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM IPTEK melalui S3 By Research	39
Total Keluaran		46

Gambar 5. Detil realisasi

E-pelaporan telah digunakan sejak tahun 2018 pada seluruh satuan kerja LIPI. Pada perjalanannya, sistem tersebut terus mengalami pengembangan dan perbaikan, baik dari sisi teknis maupun substansi yang terkait dengan monitoring dan evaluasi kegiatan di LIPI. Perubahan tersebut tidak terlepas dari perubahan lembaga atau transformasi LIPI yang menyangkut organisasi, personil, dan proses bisnis. Sampai saat ini sistem epelaporan telah terintegrasi dengan sistem lain pada intralipi sehingga data yang digunakan pada sistem E-pelaporan sinkron dengan data pada:

- E-kinerja, yaitu untuk data *Publikasiku* dan *Kegiatanku*. E-kinerja adalah sistem yang digunakan LIPI untuk kinerja individu/SKP
- Simpeg, yaitu untuk data pengguna dan pegawai. Simpeg adalah sistem informasi pegawai yang memuat database seluruh pegawai LIPI
- Intralipi, yaitu untuk role/peran pemilik proses. Intralipi adalah sistem komunikasi dan informasi internal LIPI
- Sipadu, yaitu untuk data master sasaran strategis. Sipadu adalah sistem informasi perencanaan terpadu.

Ditinjau dari penggunaannya selama ini, beberapa hal yang harus diperhatikan supaya E-pelaporan dapat berfungsi maksimal sebagai sistem monitoring dan evaluasi yang

andal adalah, *pertama*, keterlibatan dan disiplin dari seluruh pemilik proses untuk menjalankan perannya. Peran yang sangat penting adalah pengisian data keluaran oleh Civitas. Pengisian data harus dilakukan pada saat keluaran tercapai. Apabila pengisian ditunda atau terlambat maka data capaian kinerja yang ditampilkan pada pelaporan akan tidak akurat sehingga informasi yang ditampilkan menjadi kurang berarti. Demikian pula dengan proses validasi dan klaim capaian yang dilakukan oleh satuan kerja dan BPK harus dilakukan saat data keluaran sudah diinput dan dinyatakan valid oleh satuan kerja. Keterlambatan validasi dan klaim juga akan membuat informasi yang terbaca menjadi tidak akurat.

Kedua, validasi data keluaran oleh satuan kerja harus dilakukan dengan teliti supaya data keluaran yang diklaim sebagai capaian kinerja sesuai dengan target yang diminta. Petugas yang melakukan validasi harus benar-benar memahami kriteria keluaran yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Kinerja. Kekeliruan dalam memahami kriteria dan definisi dari target di dalam Perjanjian Kinerja dapat mengakibatkan keluaran yang diklaim sebagai capaian lembaga tidak mencerminkan kinerja lembaga sehingga tujuan monitoring tidak tercapai.

Ketiga, upload laporan kinerja yang disusun berdasarkan data capaian pada E-pelaporan tidak boleh ditinggalkan. Laporan kinerja tersebut merupakan laporan utuh yang memuat analisis menyeluruh tentang kinerja lembaga. Tanpa dokumen laporan kinerja ini maka informasi yang disajikan dalam E-pelaporan kurang mendalam sebab E-pelaporan hanya memuat informasi ringkas.

Sistem pelaporan daring yang terintegrasi dengan fungsi lain belum banyak dibangun oleh instansi pemerintah. Banyak sistem yang dibangun mengikuti kebutuhan masing-masing fungsi namun masih terpisah satu sama lain. Sehingga meskipun sistem daring yang dimiliki sudah menjawab kebutuhan fungsi namun bila tidak terintegrasi maka tidak mengurangi banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan karena sistem yang terpisah. Integrasi sistem mempunyai keunggulan dalam mengurangi proses berulang dan menyingkat tahapan pekerjaan. Namun juga memiliki kelemahan yaitu ketika harus dilakukan perubahan terkait kebutuhan

atau perkembangan baru tidak bisa serta merta langsung dilakukan. Perubahan pada sistem harus dilakukan secara hati-hati karena sistem yang terintegrasi akan mempengaruhi fungsi lain.

Penggunaan sistem elektronik pada instansi pemerintah telah menjadi kebutuhan, sejalan dengan pengembangan *e-government* untuk mewujudkan *good governance*. *E-government* membawa konsep baru seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah (Muhammad et al., 2009). Cakupan *e-government* sangat luas, OECD menyebutkan bahwa *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, sebagai alat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (OECD, 2003).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Bhuiyan, 2011) bahwa sistem elektronik menjanjikan proses yang lebih akuntabel, transparan dan berbiaya lebih rendah dibandingkan sistem manual atau konvensional. *E-government* akan membuat pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan memungkinkan pemerintah memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan mudah (Almarabeh & Ali, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan sistem elektronik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keniscayaan. Sistem elektronik dapat membantu instansi pemerintah menciptakan tata kelola birokrasi yang akuntabel dan transparan sehingga mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran dan pelayanan publik yang lebih baik. Mengembangkan sistem elektronik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek mendasar dari *e-government* untuk mewujudkan *good governance*.

E-pelaporan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan unit kerja yang berbeda, yaitu Civitas sebagai individu, Satker sebagai institusi, dan Biro Perencanaan dan Keuangan. E-pelaporan mendukung aspek akuntabilitas kelembagaan dengan menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik yang menampilkan

informasi kinerja secara ringkas dan mudah dibaca. Meski ringkas, informasi kinerja yang ditampilkan dalam E-pelaporan memudahkan lembaga untuk memantau capaian kinerja dengan cepat tanpa harus menunggu proses pendataan yang biasanya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Penggunaan sistem elektronik terintegrasi mengurangi waktu kerja yang dibutuhkan, menyederhanakan proses validasi dan pengelolaan data. Dalam lingkup yang lebih luas, dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat berdasarkan data yang valid. Pada akhirnya mendukung tujuan terciptanya *good governance*.

Penggunaan sistem elektronik untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi internal menjadi sangat penting mengingat sistem yang ada pada eksternal lembaga lebih menitikberatkan pada kinerja lembaga di level makro atau indikator kunci. Dengan tersedianya sistem pelaporan kinerja yang detail dapat membantu lembaga memantau proses pencapaian kinerja dan segera melakukan tindakan intervensi ketika pencapaian tidak sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Selain itu, sistem pemantauan kinerja yang dibuat secara mandiri oleh lembaga juga mencakup kinerja pribadi. Sistem pelaporan kinerja seperti E-pelaporan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan capaian kinerja utama di tingkat nasional dengan capaian kinerja di tingkat unit kerja, bahkan di unit kegiatan yang lebih kecil, sekaligus menghubungkan kinerja personal dengan kinerja kelembagaan.

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pendalaman pada sistem pemantauan kinerja yang terintegrasi antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Kinerja individu merupakan elemen pokok pada pencapaian kinerja organisasi. Sistem yang mengintegrasikan keduanya akan meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Adesuyi, S., & Gbervbie, D. (2022). E-Government: Mitigating Administrative Corruption in Nigerian Public Institutions. *African Renaissance Special Issue On Innovation and*

Sustainable Development in the Information Age, 109–131.

Almarabeh, T., & Ali, A. A. (2010). A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. *European Journal of Scientific Research*, 39(1), 29–42.

Bhuiyan, S. H. (2011). Modernizing Bangladesh public administration through e-governance: Benefits and challenges. *Government Information Quarterly*, 28(1), 54–65. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.006>

Denti, E., Abdillah, W., & Santi, F. (2021). Analisis Implementasi Sistem Elektronik Kinerja(ekinerja) Pemerintah Provinsi Bengkulu. *The Manager Review Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2).

Forbes, M., Hill Assistant Professor, C. J., Lynn, L. E., & George W Bush, J. H. (2005). *Public Management and Government Performance: An International Review*.

Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*, 24(2), 266–290.

Glendoh, S. H. (2000). Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi. *Jurnal Manajemen*, 2 (1)(14).

Greene, J. (1999). Public Policy and Program Evaluation. In *Administrative Science Quarterly* (Vol. 44, pp. 433–436). Sage Publications Inc.

Lee-Geiller, S., & Lee, T. (2019). Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation. *Government Information Quarterly*, 36, 208–225.

Maric, S. (2014). How to Get Result in Public Policies: Monitoring and Evaluation with the Evidence Supplied by the Civil Society. In *Foundation for the*

- Advancement of Economics*. European Policy Centre.
- Moleong, Lexi. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H., Almarabeh, T., & Ali, A. A. (2009). E-Government in Jordan. *European Journal of Scientific Research*, 35(2), 188–197.
- Mukaromah, M. (2011). HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN DAN KOMPENSASI DENGAN PRESTASI KERJA GURU DI SMA NEGERI SEKOTA BEKASI. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2).
- OECD. (2003). *The e-government Imperative*.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari sejumlah Daerah di Indonesia. *The 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia*.
- Rahman, B. (2016). Sistem Monitoring Kinerja PNS Dengan Aplikasi SKP Berbasis WEB. *PROGRESIF*, 12(1), 10.
- ReSPA. (2015). *Monitoring and Evaluation of Public Policies. Conference Report and Follow-up Actions for ReSPA in the area of Monitoring and Evaluation*.
- Riyadini, B. (2013). *Responsibilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Penelitian Evaluasi*. Banyu Nusa Atmanakarya.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. (2009). *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sadjiarto, A. (2000). AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN. *Jurnal Akuntansi*, 2 (2)(13).
- Sartomo, A. (2012). *Penataan Tatalaksana di Instansi Pemerintah*.
- Singh, P., Dwivedi, Y. K., Kahlon, K. S., Sawhney, R. S., Alalwan, A. A., & Rana, N. P. (2020). Smart Monitoring and Controlling of Government Policies Using Social Media and Cloud Computing. *Information Systems Frontiers*, 22(2), 315–337. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09916-y>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Utomo, T. W. W. (2011). *Building Good Governance Through Decentralization in Indonesia (Recognizing Some Inhibiting Factors in The Implementation Stage. Limits of Good Governance in Developing Countries* . Gadjah Mada Press University.
- Widyawati, L. (2017). *Sistem Pemantauan Pembangunan Tingkat Menengah*.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. ANDI.